**CALON ANGGOTA LEGISLATIF (CALEG) PEREMPUAN PPP DALAM PANDANGAN MASYARAKAT**

(Studi Kasus Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2019 Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Gresik)

Proposal Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh :

Yahya Ahmadi

NIM: E74212068

JURUSAN FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perempuan di Indonesia sering dianggap sebagai pekerja domestik, karena sampai saat ini budaya patriarki di Indonesia masih sangat kuat. Budaya patriarkhi tersebut menjadi penghambat bagi perempuan untuk berkembang di sektor publik. Di Jawa Timur, budaya patriarki masih sangat dominan dan sangat jelas terlihat dalam kehidupan Masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan maupun di bidang politik. maka keberadaan mereka dalam dunia politik di Indonesia menjadi sebuah proses yang cukup lama.

Menurut UNDP Indonesia, meskipun perempuan di Indonesia secara aktif memberikan sumbangsih mereka bagi perekonomian nasional maupun rumah tangga, sebagian besar perempuan masih tidak dilibatkan dalam berbagai struktur dan proses pengambilan keputusan di keluarga, Masyarakat maupun tingkat Negara.

Peran perempuan dan politik tentunya tak lepas dari pandangan dan kontruksi sosial perempuan dalam relasi Masyarakat. Pandangan yang selama ini diteguhkan dalam benak Masyarakat adalah konsep stereotip tentang perempuan, utamanya dalam sektor politik dan pemerintahan. stereotip tersebut kemudian menjadi pandangan bahwa perempuan tidak layak memimpin, karena mereka tidak rasional dan lebih mengandalkan emosinya. Pandangan yang berasal dari stereotip tersebut yang akhirnya banyak menimbulkan ketimpangan gender, sehingga peran perempuan menjadi terpinggirkan di dunia politik.

Berdasarkan data dari UNDP Indonesia, sejak tahun 2004 hingga 2014 keterwakilan perempuan di DPR RI sebesar 26,52%, sedangkan laki-laki mencapai 73,48%. Data itu memperlihatkan bahwa quota perempuan yang ada di DPR RI masih sangat sedikit dan belum mencapai quota 30% sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan pada data yang ada, banyak laki-laki yang mendominasi kursi di DPR RI. Dominasi laki-laki dalam dunia politik inilah yang berakibat perempuan kurang mendapat perhatian dalam berbagai bidang karena kurangnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan.

Rendahnya Keterwakilan perempuan di dunia politik disebabkan masih adanya anggapan bahwa dunia politik adalah dunianya laki-laki, di mana sistem dan struktur sosial yang berbudaya patriarkhi telah memposisikan perempuan pada tempat yang tidak sejajar dengan kaum laki-laki. Menurut Syaikhu Busiri, anggota DPRD Gresik, saat ini jabatan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dan jabatan Ketua Rukun Tetangga masih didominasi kaum laki-laki, padahal untuk membangun Negara juga perlu peranan perempuan, dan cara pandang tersebut harus selalu disuarakan sesuai UU NO 4 tahun 2012.[[1]](#footnote-1)

Kurangnya jumlah perempuan yang aktif terlibat dalam dunia politik dan minimnya wawasan perempuan tentang politik, serta dorongan partai politik yang belum maksimal terhadap perempuan membuat perempuan lemah di bidang perpolitikan. Walaupun ada ruang dan harapan bagi perempuan untuk aktif melibatkan diri dalam dunia politik, utamanya menjadi calon legislatif, tetap saja peluang tersebut bergantung pada pimpinan partai politik, karena pimpinan-pimpinan partai politik tersebut lah yang berkuasa untuk menetapkan nomor urut calon legislatifnya.[[2]](#footnote-2)

Perempuan yang aktif di dunia publik khususnya di dunia politik sering mendapat hambatan, baik itu di ruang lingkup domestiknya maupun di ruang lingkup publik. Hambatan itulah yang membuat kebanyakan perempuan merasa berat dan tidak ingin berkiprah di bidang politik walaupun banyak dukungan yang menguatkan mereka. Padahal sesungguhnya, baik laki-laki ataupun perempuan memiliki kesamaan hak dalam berkarya di bidang politik. Ainul Farosida, pengurus Fatayat NU yang juga Kepala Sekolah Madrasah Ibtida’iyah yang ada di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, mengatakan bahwa peranan perempuan harus ditingkatkan dan digerakkan dalam menunjang pembangunan, khususnya pada peningkatan perekonomian keluarga, sehingga bangsa Indonesia segera bangkit dari keterpurukan, dan bahwa perempuan berhak untuk menjadi Kepala Daerah ataupun Ibu rumahtangga yang berpengalaman dan kreatif.[[3]](#footnote-3)

Namun, budaya patriarkhi yang memandang lemah perempuan berakibat peran perempuan dibidang politik terpinggirkan. Anggapan lemah itulah yang menjadikan keterwakilan perempuan di partai politik kurang diminati baik di tingkat kabupaten, daerah, ataupun di tingkat provinsi sekalipun.[[4]](#footnote-4)

Keterwakilan perempuan yang rendah berpengaruh dalam posisi-posisi pengambilan keputusan disektor publik dan berdampak pada pembuatan kebijakan ekonomi dan sosial yang kemudian lebih memberikan keistimewaan terhadap cara pandang dan kepentingan-kepentingan kaum laki-laki, serta permodalan sumber-sumber daya nasional dengan mempertimbangkan keuntungan bagi kaum laki-laki.

Berbagai kendala dan permasalahan yang telah teruraikan diatas yang menghambat gerak perempuan dalam berpolitik banyak terjadi di Gresik. Di Kecamatan Kebomas-Gresik Kabupaten Gresik, terdapat beberapa perempuan yang berpartisipasi pada pemilu legislatif tahun 2019. Data dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) menunjukkan, dari 83 calon legislatif yang diusung 15 partai, yang mewakili dapil 1 Kecamatan Kebomas-Gresik Kabupaten Gresik, ada 35 calon legislatif perempuan yang ikut berpartisipasi dalam pemilu legislatif tahun 2019.

Kendala juga datang dari parpol pengusung yang setengah-setengah dalam mengusung nama perempuan, hanya sekedar untuk melengkapi syarat dan untuk mengisi 30 persen ruang keterwakilan perempuan agar lolos verivikasi KPU.

**Tabel 1.**

**DAFTAR CALEG PARPOL DENGAN SUARA TERBANYAK DI DAPIL 1 KECAMATAN GRESIK-KEBOMAS KABUPATEN GRESIK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | PKB (20.128 suara) | Gerindra (18.022 suara) | PAN (13.678 suara) | Golkar (11.922 suara) | PPP (9.256 suara) |
| 1 | Syaikhu Busiri | Anang Yahya | Mubin | Ahmad Nurhamim | Hj. Lilik Hidayati |
| 2 | H. Chusni Thamrin | Markasim Halim Widianto | Didik Widodo | Erry Sucahyo | Nur Azizah Febriyanti |
| 3 | Hamidah Handayani | Munawarah | Asmaul Chusna Ike Wahyuni | Herawati | Siti Munawaroh |
| 4 | Septrianto Maulana | Dwi Laksono | Wahyani Ahmad | Yahya Rachmadin | Mochammad Hasan |
| 5 | Mufidatul Ummah | Yeni Yulianti | Agustina Sumarti | Kholid | Maksum |
| 6 | Jazilatur Rohmah | Dwi Cahyati | Yuwanita Tri Wijayanti | Lutfiyah | Zainal Abidin |
| 7 | Chusaini | H. Syafiqi M. Zain |  | Nor Farida | Abdul Wahab |

Sumber : surabaya.tribunnews.com-Hasil rekapitulasi suara pemilu 2019 tingkat KPU Kabupaten Gresik, sabtu 4 Mei 2019

Hal tersebut dapat diamati dari cara parpol memberikan nomor urut untuk caleg perempuan, dan dari 15 parpol pengusung hampir semuanya tidak ada yang menempatkan caleg perempuan di nomor urut 1 dan 2. Hanya parpol PPP yang dengan percaya diri menempatkan caleg perempuan di nomor urut 1,2 dan 3 secara berurutan.

Berdasarkan dengan adanya permasalahan-permasalahan bahwa adanya bias gender yang menyebabkan peran perempuan dalam berpolitik masih terpinggirkan dan kurang mendapat dukungan Masyarakat, serta keberanian parpol PPP dalam menempatkan caleg perempuan pada nomor urut 1,2 dan 3 secara berurutan seolah menentang stereotip terhadap perempuan dan budaya patriarki, yang menjadi anomali karena berbeda dengan parpol pada umumnya, maka menjadikan topik permasalahan tersebut akan sangat menarik sebagai kajian skripsi, ditambah dengan pernyataan seorang perempuan pengurus organisasi perempuan Fatayat NU yang juga Kepala Sekolah salah-satu MI dalam Kecamatan kebomas, yang mengatakan bahwa peningkatan perempuan sangat penting, menjadikan pembahasan tentang perempuan masih penting untuk diperbincangkan dan diteliti. Maka peneliti hendak mengambil topik penelitian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan terhadap caleg perempuan yang mengikuti kontestasi pemilu legislatif dari parpol PPP dalam pandangan Masyarakat di Kecamatan Kebomas-Gresik Kabupaten Gresik, bagaimana bentuk-bentuk dukungan yang didapat oleh caleg perempuan dari parpol PPP di Kecamatan Kebomas-Gresik Kabupaten Gresik, dan hambatan yang dihadapi oleh caleg perempuan dari parpol PPP dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Kebomas-Gresik Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, peneliti mengambil kasus yang ada ini menjadi sebuah penelitian dengan judul “**CALON ANGGOTA LEGISLATIF (CALEG) PEREMPUAN PPP DALAM** **PANDANGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pemilihan Legislatif 2019 Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Gresik).”**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dukungan yang diperoleh dan kendala yang dihadapi caleg perempuan PPP pada pemilu legislatif tahun 2019 di Dapil 1 Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana penerimaan caleg perempuan PPP pada pemilu legislatif tahun 2019 dalam pandangan Masyarakat di Dapil 1 Kabupaten Gresik?
3. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui bentuk dukungan yang diperoleh dan kendala yang dihadapi caleg perempuan PPP dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Dapil 1 Kabupaten Gresik.
2. Mengetahui bagaimana penerimaan caleg perempuan PPP pada pemilu legislatif tahun 2019 dalam pandangan Masyarakat di Dapil 1 Kabupaten Gresik
3. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis

1. **Secara Teoritis** 
   1. Bahan untuk memperkaya referensi tentang permasalahan gender yang terdapat dalam Masyarakat dikaitkan dengan partisipasi perempuan dalam dunia politik.
   2. Bahan untuk kajian lanjutan tentang isu gender dalam proses sosialisasi dan dapat menjadi sumbangan bagi khasanah kepustakaan.
2. **Secara Praktis**
   1. Bahan untuk membuka wawasan Masyarakat tentang fenomena gender dalam proses sosialisasi.
   2. Dapat dijadikan salah satu masukan bagi partai politik agar dalam menentukan calon legislatifnya juga memperhatikan kehidupan kaum perempuan agar lebih berkeadilan gender
3. **Definisi Konseptual**

Guna menjelaskan penelitian ini agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini maka perlu adanya batasan istilah yang meliputi :

1. **Caleg Perempuan PPP**

Caleg (Calon Legislatif) perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah caleg perempuan yang telah memenuhi syarat oleh peraturan yang diajukan oleh parpol PPP untuk menjadi anggota legislatif (DPRD) dengan mengikuti pemilihan umum yang ditetapkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai caleg tetap pada pemilu legislatif tahun 2019 di Dapil 1 Kabupaten Gresik.

Peneliti memilih caleg perempuan dari parpol PPP karena dari 15 parpol yang mengikuti pemilu legislatif di daerah pemilihan I Kecamatan Gresik-Kebomas Kabupaten Gresik, hanya parpol PPP yang dengan percaya diri menempatkan semua caleg perempuan pada nomor urut 1,2 dan 3 secara berurutan, hal tersebut menjadikan peneliti merasa tertarik untuk memahami siapa sajakah semua caleg perempuan tersebut dan bagaimana citranya dalam pandangan Masyarakat, sehingga parpol PPP berani menempatkan mereka pada nomor-nomor yang lebih utama dari caleg laki-laki.

1. **Pemilu Legislatif**

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu legislatif adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu legislatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tingkat Kabupaten di Kabupaten Gresik pada tahun 2019.

1. **Telaah Pustaka**

Guna memperkuat penelitian ini, penulis mengambil rujukan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Suciptaningsih dalam *Jurnal Komunitas* tentang partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif diKabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan konsep kemitrasejajaran dalam teori kesetaraan peran laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal masih sangat rendah, karena dari 45 orang anggota dewan legislatif, hanya empat orang saja yang perempuan.[[5]](#footnote-5)

Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan penelitian dari Suciptaningsih yaitu sama-sama mengkaji tentang perempuan dalam politik. Perbedaannya, jika penelitian yang dilakukan oleh Suciptaningsih menggunakan konsep kemitrasejajaran dalam teori kesetaraan peran laki-laki dan perempuan, maka penelitian ini menggunakan konsep gender dan subordinasi. Fokus dari penelitian Suciptaningsih berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Fokus penelitian dari Suciptaningsih terletak pada partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Kendal dan peran perempuan dalam penentuan kebijakan di lembaga legislatif di Kabupaten Kendal, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada pandangan Masyarakat terhadap caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Gresik-Kebomas Kabupaten Gresik dan bentuk dukungan yang diperoleh serta kendala yang dihadapi caleg perempuan, dipastikan tidak ada kesamaan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian Suciptaningsih.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Wahid dalam *Malaysian Journal of Communication* mengenai perempuan dan kekuasaan politik dalampilkada DKI Jakarta tahun 2012. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik yang memfokuskan diri pada pemahaman politik dan perempuan sebagai kandidat politik. Penelitian ini menggunakan konsep kekuasaan dan hegemoni realiti politik perempuan, serta feminis radikal.[[6]](#footnote-6) Hasil penelitian menjelaskan bahwa kekuasaan perempuan dalam politik di Provinsi DKI Jakarta masih sangat sedikit dibanding dengan kaum laki-laki yang selama ini mendominasi politik, bahkan perempuan belum pernah ada yang mencalonkan diri dan dicalonkan oleh partai politik sebagai kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur.

Penelitian dari Wahid memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang perempuan dalam dunia politik. Sedangkan, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wahid dalam jurnalnya adalah dalam teori yang digunakan, Wahid menggunakan teori komunikasi politik dengan metode *feminist research*. Sementara penelitian yang peneliti lakukan konsep gender dan subordinasi. Penelitian ini juga memiliki fokus penelitian yang berbeda. Penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus untuk mendeskripsikan pandangan Masyarakat terhadap caleg perempuan, dukungan yang diperoleh dan kendala yang dihadapi caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Gresik-Kebomas Kabupaten Gresik, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahid lebih fokus untuk mendeskripsikan tentang perempuan dan kekuasaan politik di DKI Jakarta.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Astuti dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak* mengenai citra perempuan di dalam dunia politik. Penelitian ini menggunakan konsep gender dan stereotip. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosok perempuan dalam politik masih dikaitkan dengan budaya patriarkhi. Minimnya jumlah perempuan sebagai penentu kebijakan politik, menyebabkan keputusan mengenai kebijakan umum yang memengaruhi kesejajaran perempuan masih dipegang oleh laki-laki, sehingga, untuk terjun di dunia politik, perempuan masih saja menemui berbagai macam hambatan.[[7]](#footnote-7)

Penelitian dari Astuti memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang perempuan dalam dunia politik. Sedangkan, perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian dari Astuti tersebut terletak pada fokus dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Jika penelitian yang dilakukan oleh Astuti lebih fokus untuk mendeskripsikan citra perempuan dalam politik, maka penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus untuk mendeskripsikan pandangan Masyarakat terhadap caleg perempuan dalam pemilu legislatif. Perbedaan selanjutnya terletak pada konsep yang digunakan oleh Astuti yang menggunakan konsep gender dan stereotip untuk mengkaji penelitiannya, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan konsep gender dan subordinasi.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Idris (2010) dalam *Jurnal Humaniora* mengenai perempuan Minangkabau dalam politik. Hasil penelitian dari Idris ini menunjukkan bahwa peluang untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik bagi perempuan Minangkabau masih sangat kecil, tidak ditunjang oleh peraturan perundang-undangan yang eksplisit dan *affirmative action* dari pemerintah lokal maupun pemerintah pusat.

Penelitian dari Idris (2010) memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang perempuan dalam dunia politik. Sedangkan, perbedaan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan dalam penelitian. Jika peneliti meneliti tentang partisipasi politik caleg perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 dengan konsep gender dan subordinasi, maka Idris dalam penelitiannya ini meneliti tentang perempuan Minangkabau dalam politik dengan teori struktural-fungsional dari Talcott Parsons.

*Kelima,* jurnal yang ditulis oleh Alif Hidayati (2014), dalam tulisanya mengenai inmplementasi keterwakilan anggota legislatif perempuan yang belum bisa memenuhi kuota 30% dan kaitannya dengan hukum syari’at islam, penelitiannya menjelaskan bahwa peran perempuan dalam dunia politik tidak bertentangan dengan syariat islam selama perempuan tersebut memiliki kapasitas dan kecakapan dalam bidang tersebut, namun kondisi sosial budaya dan keagamaan Masyarakat yang patriarki menjadi hambatan yang cukup besar ditambah dengan hambatan lain seperti keadaan ekonomi perempuan tersebut, rumitnya sistem pemilu dan kurangnya dukungan dalam bentuk legislasi.

Penelitian Alif Hidayati tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang perempuan dalam politik, perbedaanya adalah penelitian Alif Hidayati berfokus pada implementasi pemenuhan kuota 30% dan keterkaitannya dengan hukum syariat islam, sedangkan peneliti memfokuskan penelitiannya untuk mendeskripsikan bagaimana caleg perempuan dalam pandangan Masyarakat.

1. **Metode Penelitian**
2. **Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang dapat diamati.[[8]](#footnote-8) Penggunaan pendekatan penelitian ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu untuk mengetahui pandangan Masyarakat terhadap caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Gresik-Kebomas Kabupaten Gresik, bentuk dukungan yang diperoleh calon legislatif perempuan dan kendala yang dihadapi oleh calon legislatif perempuan dalam partisipasinya pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Gresik-Kebomas Kabupaten Gresik.

Penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti secara langsung untuk mengadakan hubungan dengan informan, baik informan utama maupun informan pendukung agar lebih mendalam dalam menggali informasi untuk mengetahui pandangan Masyarakat terhadap caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019 dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. **Lokasi Penelitian**

Berawal dari ketertarikan peneliti terhadap cara penomor-urutan parpol PPP untuk caleg perempuan pada nomor urut 1,2 dan 3 secara berurutan dari 7 caleg yang terdaftar, hal tersebut terjadi di Dapil 1 Kecamatan Gresik dan Kecamatan kebomas pada pemilihan umum DPRD gresik 2019, padahal dari 15 parpol pengusung hampir semuanya tidak ada yang menempatkan caleg perempuan di nomor urut 1 dan 2. Hanya parpol PPP yang dengan percaya diri menempatkan caleg perempuan pada nomor-nomor strategis dan hal tersebut membuat peneliti merasa perlu untuk menjadikan Dapil 1 berserta fenomena yang ada perlu untuk diteliti.

Mengenai lokasi penelitian yang agak luas karena Dapil 1 melingkupi dua Kecamatan, peneliti merasa perlu untuk meneliti keduanya, Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas dikarenakan tempat tinggal 1 caleg perempuan berada di Kecamatan Kebomas Kelurahan Kawisanyar, dan 2 caleg perempuan lainnya tinggal di Kecamatan Gresik di Kelurahan yang berbeda.

Adanya pernyataan seorang perempuan pengurus Fatayat NU yang juga Kepala Sekolah salah-satu MI dalam Kecamatan Kebomas, bahwa peningkatan status dan taraf hidup perempuan adalah sangat penting, memperlihatkan bahwa pembahasan tentang perempuan masih penting untuk diperbincangkan dan menandakan bahwa pemikiran perempuan di daerah tersebut sudah lebih maju. Hal tersebut menjadi nilai tambah mengapa Dapil 1 layak untuk dijadikan lokasi penelitian.

1. **Sumber Data**

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[[9]](#footnote-9) Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

* 1. Sumber Data Primer

Sumber Primer adalah sumber utama yang dibutuhkan dalampenelitian ini. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara denganinforman saat terjun langsung ke lapangan.

Informan adalah sumber utama dalam penelitian. Beberapa informan akan dipilih berdasarkan kebutuhan, serta berkaitan dengan tema penelitian. Penentuan Informan dalam penelitian kualitatif sangat penting karena peneliti akan langsung memperoleh data dan informasi dari pihak yang terkait sesuai dengan tema penelitian.

Dalam penelitian ini informan diklasifikasikan menjadi dua sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan menggunakan teknik *purpossive sampling*, yakni teknik pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling menguasi tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.[[10]](#footnote-10)

Pertama, Informan yang berasal dari tokoh-tokoh Masyarakat Kebomas, informan yang memiliki kedudukan atau pengaruh dalam Masyarakat. Kedua, informan yang berasal dari Masyarakat yang mengenal caleg-caleg perempuan tanpa memandang hubungan kekeluargaan yang bertempat tinggal di Kecamatan Gresik maupun Kecamatan Kebomas, ketiga, informan yang berprofesi sebagai guru, aktifis atau anggota partai politik yang tinggal atau berdinas diwilayah Dapil 1, dan informan yang keempat adalah caleg perempuan yang mencalonkan diri di wilayah Dapil 1 dari parpol PPP .

Informan diatas dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Semua informan yang telah dipilih dianggap paling memahami masalah pokok penelitian sehingga Peneliti memperoleh data sesuai harapan.

* 1. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dan dokumen-dokumen penunjang sumber primer untuk melengkapi data, baik dari Kecamatan maupun dari media massa, yang berkaitan dengan tema penelitian, antara lain koran, *browsing*, internet, foto, buku, dan jurnal berkaitan dengan profil Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

1. **Informan Penelitian**

Penelitian kualitatif tidak ditujukan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Maka pada penelitian kualitatif tidak dikenal populasi dan sampel. Sumber data lapangan pada penelitian kualitatif disebut informan atau subyek penelitian. Subyek penelitian merujuk pada orang atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (kasus) yang diteliti. Subyek penelitian atau informan tersebut yang akan menjadi sumber data yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.6

Dalam menentukan informan atau subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yakni peneliti telah menentukan sumber data atau informan denganpertimbangan tertentu.7 Pertimbangan tertentu misalnya informan tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia memiliki kedudukan atau ketokohan sehingga akan memudahkan peneliti menelusuri obyek atau situasi sosial yang diteliti.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu :

**Tabel 2. Nama Informan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Informan | Profesi | Keterangan |
| 1. | Ibu Lilik H. | Anggota DPRD | Caleg No 1 (inkumben) |
| 2. | Ibu Siti M. | Pengajar | Caleg No 3 |
| 3. | Ibu Ainur R. | Kepala MI | Mantan Caleg |
| 4. | Bpk. Agus S. | Ketua RT | Tokoh Masyarakat |
| 5. | Bpk. Siswanto | Ustd/Pengajar | Tokoh Agama |
| 6. | Bpk. Abd Rohman | Ustad/Dosen | Tokoh Agama |
| 7. | Bpk. Dimyati S. | Ta’mir Masjid | Warga Kec. Gresik |
| 8. | No Name 1 | - | Warga Kec. Gresik |
| 9. | Bpk. Susilo | Pedagang | Warga Kec. Gresik |
| 10. | No Name 2 | IRT | Warga Kec. Kebomas |
| 11. | KH Umar T | Ustd/Kyai | Tokoh Agama |

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang digunakanuntuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan danpenginderaan. Observasi yang dilakukan peneliti adalahmemperhatikan hubungan baik antara peneliti dengan informan, agarinforman dapat menerima peneliti tanpa harus dicurigai, karena hal itumenjadi hambatan utama terhadap keberhasilan observasi, makakesadaran diri (*self awareness*) peneliti digunakan dalammengendalikan semua keterbatasan ini.

Dalam observasi ini dibutuhkan kemampuan peneliti secara optimal baik dari segi motif, kepercayaan, perhatian, kebebasan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, untuk dapat berpartisipasi di tempat lokasi penelitian dengan maksud untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka peran aktif peneliti di lapangan sangat diperlukan. Sejalan dengan hak tersebut, peneliti terlibat langsung dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan atau pengamatan tanpa peran serta, pengamat hanya melakukan fungsi yaitu mengadakan pengamatan.[[11]](#footnote-11) Data yang ingin diperoleh dari observasi yakni mengenai kultur Masyarakat di Dapil 1.

1. Wawancara

Wawancara sangat penting di dalam penelitian ini, karena dengan wawancara kita berinteraksi langsung dengan informan dan peneliti secara langsung memperoleh informasi dan data. Wawancara dilakukan untuk memperoleh kelengkapan data tentang hal-hal yangingin diteliti.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara (*responden*) memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.[[12]](#footnote-12) Dalam teknik wawancara peneliti menggunakan *in-dept interview*, yakni melakukan proses wawancara secara bebas, menemukan permasalahan secara terbuka, dimana informan diminta pendapat, dan ide-idenya. Peneliti membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan kepada informan. Informan yang akan diteliti menggunakan metode wawancara *in-depth interview* adalah tokoh Masyarakat, tokoh agama, Masyarakat yang paham tentang topik yang dibicarakan.

Data yang ingin diperoleh dari wawancara yakni tentang penerimaan Masyarakat di Kecamatan Gresik-Kebomas terhadap adanya caleg perempuan pada pileg 2019 di Dapil 1 Kabupaten Gresik. Serta pendapat mereka tentang sosok caleg yang ada dan rekam jejak mereka di dalam perpolitikan.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya peraturan, kebijakan.[[13]](#footnote-13) Dokumentasi digunakan agar penelitian ini terlihat nyata dengan mendokumentasikan setiap agenda kegiatan penelitian, contoh saat mewawancarai para informan. Dokumentasi digunakan untuk menggambil gambar informan yang sedang di wawancara oleh peneliti, hasil rekapitulasi, data monografi.

1. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena analisis datanya dilakukan induktif kualitatif. Penelitian kualitatif berkembang sebagai suatu metode *disciplined* *inquiry* yang sifatnya lebih induktif. Dalam hal ini peneliti memiliki kadar keterlibatan tinggi (dengan segenap jiwa dan raganya) aktif mendengar, mengobservasi, bertanya, mencatat, terlibat, menghayati, berfikir, dan menarik infrensi dari apa yang di pelajari di lapangan.[[14]](#footnote-14)

Menurut *Miles* dan *Huberman*,[[15]](#footnote-15) dalam menganalisa data kualitatif dapat melakukan cara yang terdiri dari:

1. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data adalah suatu bentuk analisa menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan menggorganisasikan dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverivikasi.

1. Penyajian Data

Penyajian data, sekumpulan informasi yang telah tersusun secara terpadu dan mudah di pahami yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan.

1. Verivikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi, kemampuan seorang peneliti dalam menyimpulkan berbagai temuan data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

1. **Teknik Keabsahan Data**

Teknik Keabsahan data yang digunakan peneliti adalah dengan Triangulasi**.** Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.[[16]](#footnote-16)

Dari keempat macam triangulasi tersebut peneliti menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Peneliti menggunakan wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.[[17]](#footnote-17)

1. **Sistematika Penulisan**

Bab I Merupakan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Konseptual, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab II Membahas tentang Kajian Teori dan konseptual yang meliputi Konsep Gender, Gender di wilayah Domestik dan Publik, Konsep Gender dan Politik, Konsep Perempuan dalam Politik

Bab III Menyajikan Setting penelitian yang berisi informasi mengenai lokasi penelitian berupa Sejarah Kota Gresik, Letak Geografis dan Demografi, Kondisi Sosial Keagamaan, Kondisi Sosial Politik, Perolehan Suara PPP 2 periode.

Bab IV Menyajikan Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab V Merupakan Bab terakhir atau Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

**BAB II**

**KAJIAN TEORI DAN KONSEPTUAL**

* + 1. **Konsep Gender**

Gender adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggungjawab, dan pembagian kerja antara laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan Masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat, kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, contohnya adalah fungsi reproduksi, menstruasi dan menyusui oleh perempuan, fungsi mempunyai sperma oleh laki-laki.

Istilah gender berasal dari bahasa Inggris bermakna jenis kelamin. Sejumlah penulis tentang hal ini membedakan antara kata gender dan kata seks (jenis kelamin). Pengertian gender merupakan penggolongan atau pembagian sifat manusia yang ditentukan berdasarkan sifat bawaan biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sifat bawaan yang dimaksud misalnya, bahwa laki-laki identik dengan otonom, independen (mandiri), ambisi, agresif, mampu mengontrol keadaan, sementara perempuan identik dengan keterikatan, dependen (bergantung), berkorban, pengasuh anak.[[18]](#footnote-18)

Fakih Mansour mengartikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.[[19]](#footnote-19) Sedangkan Robert Stoller mengartikan gender adalah untuk mebedakan hal-hal yang merupakan ciri biologis manusia dengan hal lain yang terkait dengan sosial budaya. Dapat dipahami bahwa gender adalah perbedaan mengenai fungsi dan peran sosial laki-laki dan perempuan yang terbentuk oleh lingkungan dimana seseorang berada. Gender lebih dimaknai dengan norma dan kebiasaan yang berlaku di suatu tempat tentang bagaimana laki-laki dan perempuan apakah sesuai atau tidak sesuai dengan tata nilai sosial dan budaya di suatu tempat.[[20]](#footnote-20) Maka dapat dikatakan bahwa gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Ciri-ciri atau sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan.[[21]](#footnote-21)

Terdapat dua pendapat yang saling bertentangan terkait terbentuknya sifat maskulin dan feminin pada laki-laki dan perempuan. Pendapat pertama meyakini bahwa perbedaan sifat maskulin dan feminin ada keterkaitan dengan, bahkan tidak bisa lepas dari pengaruh perbedaan biologis atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis laki-laki dan perempuan adalah alami, begitu pula dengan sifat maskulin dan feminin yang dibentuknya. Pendapat kedua mengatakan bahwa pembentukan sifat maskulin dan feminin tidak disebabkan oleh perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan karena adanya sosialisasi atau kulturasi dalam lingkungan sosial.[[22]](#footnote-22) Mereka tidak mengakui adanya sifat alami maskulin dan sifat alami feminin (*nature*), tetapi yang ada adalah sifat maskulin dan feminin yang dikonstruksi oleh sosial budaya melalui proses sosialisasi (*nurture*). Maka dari dua argumen tersebut munculah teori *nature*, dan teori *nurture.*

1. **Teori Nurture**

*Nurture* adalah suatu faktor kepribadian tentang kekuatan lingkungan yang mengatur perkembangan manusia. menurut teori *nurture*, perbedaan perempuan dan laki-laki merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang akirnya menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Hal tersebut berakibat perempuan terpinggirkan peran dan kontribusinya dalam bermasyarakat. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar.

1. **Teori Nature**

Menurut teori *nature*. pembedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, warisan biologis yang dibawa seseorang, sehingga harus diterima. Adanya perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Beberapa peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena berkaitan dengan keadaan biologis.

Kebanyakan orang masih mencampuradukkan pengertian gender dengan takdir. Sebagai contoh, jika perempuan melakukan pekerjaan yang dianggap pekerjaan laki-laki, maka dianggap menyalahi kodrat. Padahal arti dari kodrat itu sendiri merupakan sifat biologis yang berasal dari Tuhan, bukan hasil betukan sosial dari lingkungan seperti halnya pekerjaan. gender merupakan atribut dan perilaku yang terbentuk melalui proses sosial, sehingga istilah gender lebih merujuk kepada bangunan kultural yang acap kali masalah atau isu yang berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak, dan fungsi yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan.

Dari beberapa penjelasan mengenai gender di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gender merupakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi lingkungan, dan dapat berubah sesuai kondisi lingkungan dengan perkembangan zaman.

* + 1. **Gender di Wilayah Domestik dan Publik**

Dari waktu ke waktu, semakin banyak perempuan yang masuk ke ranah publik untuk bekerja atau memiliki suatu profesi. Keluarnya perempuan dari wilayah domestik ke wilayah publik disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena pendidikan perempuan yang semakin tinggi, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing dengan laki-laki di sektor publik, karena keinginan untuk maju dan berkembang, karena adanya tuntutan zaman yang sudah berubah dan karena bertujuan meningkatkan status sosial.[[23]](#footnote-23)

Namun kesadaran dan keinginan kaum perempuan untuk keluar dari wilayah domestik tidak terlepas dari kendala yang bernama kultur. Kultur, sistem dan tata norma yang ada dalam Masyarakat masih menginginkan perempuan untuk berperan ganda, yaitu: berperan sebagai pekerja (publik-produktif) dan berperan sebagai ibu rumah tangga (domestik-reproduktif). Moser dalam bukunya Mansour Fakih menjelaskan bahwa produktif merupakan peranan yang dikerjakan perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pendapatan tunai atau sejenisnya. Contoh: kegiatan bekerja baik di sektor formal maupun informal. Sedangkan reproduktif adalah peranan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengasuhan anak dan tugas-tugas dalam rumah yang dibutuhkan untuk menjamin pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja yang menyangkut kelangsungan tenaga. Contoh: menyusui, melahirkan, mengasuh anak, memasak dan mencuci, dan tugas rumahlainnya.

Keadaan dimana terdapat perbedaan peran yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan ini menyebabkan munculnya ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Ketidakadilan yang muncul dari gejala gender ini berfokus pada kaum perempuan. Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan gender meliputi:

1. **Marginalisasi**

Marginalisasi yang terjadi pada kaum perempuan terjadi secara multidimensional dan disebabkan oleh banyak hal, bisa berupa kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan tradisi, tata norma dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.[[24]](#footnote-24) Marginalisasi kepada perempuan tidak hanya terjadi di tempat kerja, tetapi juga dalam rumah, Masyarakat atau kultur, dan bahkan pada tingkat negara.

1. **Subordinasi**

Subordinasi dapat dimaknai penomorduaan atau kedudukan kedua yang berarti sebagai pelengkap bagi kedudukan pertama. Pada dasarnya, subordinasi adalah keyakinan bahwa salahsatu jenis kelamin lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak lama ada anggapan bahwa laki-laki lebih utama dari perempuan, banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun dalam aturan birokrasi yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi dari laki-laki.

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang strategis. [[25]](#footnote-25)Artinya kaum perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang penting dan akibannya dalam kehidupan bermasyarakat, rumah tangga, dan bernegara, banyak kebijakan yang dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan.

1. **Stereotipe**

Stereotipe adalah penilaian atau pelabelan terhadap seseorang kelompok hanya berdasarkan persepsi terhadap seseorang dengan mengkategorikannya. Stereotipe biasanya berakibat merugikan pihak yang dilabelkan dan berdampak pada ketidakadilan sosial. stereotipe gender umumnya disandang kaum perempuan dengan label-label yang negatif.

contohnya, adanya anggapan bahwa perempuan identik dengan menangis, emosional, cerewet, lemah, penakut dan sebagainya, sehingga perempuan tidak dapat dibebani tugas laki-laki.

1. **Beban Ganda**

Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salahsatu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Perempuan dalam kebiasaan Masyarakat adalah untuk mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak daripada laki-laki. Dalam keadaannya sekarang, banyak perempuan yang bekerja diluar rumah, namun mereka masih memiliki pekerjaan di dalam rumah jawab yang harus dikerjakan disinilah beban ganda terjadi.

* + 1. **Gender dan Politik**

Masyarakat di Indonesia pada umumnya mengenal perempuan sebagai makhluk yang emosional, lemah lembut, cantik, feminin dan keibuan. Sementara juga memandang kaum laki-laki adalah makhluk yang kuat, rasional, dan maskulin. Padahal, sebenarnya sifat-sifat yang diidentikan kepada perempuan dan laki-laki itu dapat dipertukarkan. Misalkan saja ada laki-laki yang lembut, emosional dan ada pula perempuan yang atletis, rasional dan kuat. Sifat-sifat yang diidentikan tersebut kemudian ditarik kedalam ranah publik, sehingga karena sifat-sifat yang diidentikan tersebut membuat perempuan tidak mampu melaksanakan tugas laki-laki, termasuk bidang politik.

Pandangan terkait gender tersebut juga dapat kita lihat pada kehidupan bermasyarakat di Jawa. Contoh, Masyarakat jawa dahulu beranggapan bahwa bagi perempuan sekolah tidak perlu tinggi-tinggi nantinya juga akan bekerja di dapur. Anggapan-anggapan tersebut menyebabkan sulitnya perempuan untuk terjun di ranah publik, dan diantaranya adalah bidang politik, disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.[[26]](#footnote-26)

Politik pada hakikatnya adalah kekuasaan dan pengambilan keputusan, yang lingkupnya meliputi institusi keluarga sampai pada institusi politik formal tertinggi. Oleh karena itu, pengertian politik pada prinsipnya juga meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari, yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan.[[27]](#footnote-27) Maka menjadi sangat penting, adanya peran perempuan masuk ke ranah politik untuk dapat ikut andil dalam membuat kebijakan sesuai dan tepat sasaran.

Politik sebagaimana dipahami bersama adalah interaksi antara pemerintah dan Masyarakat dalam rangka proses pembuatan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama, berkaitan dengan kepentingan banyak orang baik tua, muda laki-laki ataupun perempuan. Dalam pemahaman ini, maka tidak ada perbedaan sama sekali antara laki-laki dan perempuan. Setiap orang punya peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam ranah politik. Maka kedudukan antara laki-laki dan perempuan haruslah sama, dimana hubungan tersebut harus setara dan seimbang atau dalam hubungan kerja harus bersifat “*partnership*”, dalam hubungan bermasyarakat baik dalam kehidupan rumah tangga yang bersifat domestik maupun yang bersifat publik.

* + 1. **Perempuan Dalam Politik**

Peran perempuan dan politik tentunya tak lepas dari pandangan dan kontruksi sosial perempuan dalam hubungan dengan Masyarakat. Pandangan yang selama ini tertanam kuat dalam benak Masyarakat adalah konsep stereotip tentang perempuan, utamanya dalam sektor politik dan pemerintahan. stereotip tersebut kemudian menjadi pandangan bahwa perempuan tidak sepatutnya menjadi memimpin, karena mereka tidak rasional dan lebih mengandalkan emosinya. Pandangan yang berasal dari stereotip tersebut yang akhirnya banyak menimbulkan ketimpangan gender, sehingga peran perempuan menjadi terpinggirkan di dunia politik.

Ketimpangan yang terjadi berakibat kurangnya jumlah perempuan yang terlibat dalam dunia politik serta membatasi wawasan perempuan tentang politik, partai politik pun kurang maksimal dalam memberikan dukungan terhadap kader parpol perempuan, kecuali hanya sebagai pengisi kuota 30 persen. Walaupun ada ruang dan harapan bagi perempuan untuk aktif melibatkan diri dalam dunia politik, utamanya menjadi calon legislatif, tetap saja peluang tersebut bergantung pada pimpinan partai politik, karena pimpinan-pimpinan partai politik tersebut lah yang berkuasa untuk menetapkan nomor urut calon legislatifnya.[[28]](#footnote-28)

Budaya patriarkhi yang sangat dominan di Asia Tenggara dan Selatan sangat membatasi peluang perempuan secara umum untuk terjun di dalam dunia politik, atau lebih jauh lagi memegang tampuk pemimpinan politik nasional. Berdasarkan budaya patriarkhi, dominasi kaum laki-laki dilegitimasikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik.[[29]](#footnote-29)

Keberadaan budaya patriarkhi yang memandang lemah perempuan juga membuat peran perempuan dibidang politik terpinggirkan. Anggapan lemah itulah yang umumnya menjadikan keterwakilan perempuan di partai politik kurang diminati baik di tingkat kabupaten, daerah, ataupun di tingkat provinsi sekalipun.[[30]](#footnote-30) Begitu pula yang terjadi pada beberapa daerah di kabupaten Gresik, diantaranya adalah Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas yang akan menjadi tempat penelitian ini.

**BAB III**

**SETTING PENELITIAN**

1. **Deskripsi Umum**

Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas adalah 2 wilayah yang saling bersebelahan dalam kabupaten Gresik, keduanya merupakan daerah dengan jumlah penduduk terpadat dalam kawasan gresik dan menjadi dua Kecamatan yang lebih maju dibandingkan dengan Kecamatan yang lainnya, karena menjadi pusat perkonomian, industri, pusat pemerintahan, maka dua Kecamatan tersebut telah menjadi kawasan yang mengalami perkembangan yang cukup pesat dan keduanya juga sebagai tempat paling bersejarah karena di sanalah sejarah bermulanya kabupaten Gresik.

1. **Sejarah Kabupaten Gresik**

Wilayah Gresik sudah dikenal sejak abad ke 11, menjadi pusat perdagangan antar pulau dan juga sudah meluas ke berbagai Negara, sebagai kota Bandar, banyak pedagang asing yang berkunjung diantaranya dari Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Benggali, Campa dan lain-lain. Gresik tampil menonjol sejak berkembangnya agama Islam di tanah Jawa, sosok penyebar agama Islam tersebut adalah Syeih Maulana Malik Ibrahim bersama Fatimah Binti Maimun yang masuk ke Gresik pada awal abad ke 11. Syeih Maulana Malik Ibrahim yang sering disebut Sunan Gresik, sekarang makamnya yang berada di Kecamatan Gresik menjadi salah satu rujukan wisata religi di kabupaten Gresik yang masih ramai didatangi peziarah.[[31]](#footnote-31) Sedangkan Sunan Giri menurut sejarah adalah anak angkat Nyai Ageng Pinatih, seorang janda kaya raya yang juga seorang syahbandar, Sunan Giri yang makamnya berada di Kecamatan Kebomas oleh ibunya diberi nama Jaka Samudra dan kemudian diberi gelar Raden Paku. Sunan Giri disamping sebagai seorang Sunan atau Wali (penyebar agama) juga dianggap sebagai Sultan atau Prabu (penguasa pemerintahan) yang berpusat di Giri Kedaton dari tempat inilah ia dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Tahun dimana dia dinobatkan sebagai Sultan penguasa pemerintahan (1487 M) akhirnya dijadikan sebagai hari lahirnya kota Gresik, dia memerintah kota gresik selama 30 tahun dan dilanjutkan oleh keturunannya kurang-lebih 200 tahun.[[32]](#footnote-32)

Kabupaten Gresik terkenal sebagai kota Wali, karena ditemukan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan keberadaaan para wali, selain itu Gresik sering juga disebut kota Santri karena keberadaan banyaknya pondok pesantren dan sekolah-sekolah yang bernuansa keislaman, juga banyaknya industri rumahan yang bernuansa keislaman yang dihasilkan Masyarakat misalnya kopyah, sarung, mukenah, sorban dan lain-lain.

Pada mulanya kabupaten Gresik masuk wilayah administrasi Surabaya yang bernama kabupaten Surabaya, merupakan subwilayah pengembangan bagian (SWPB), termasuk salah satu bagian dari 9 subwilayah pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri perdagangan, maritim, pendidikan dan wisata. Setelah dilaksanakannya PP No 38 tahun 1974. Seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur-angsur dipindahkan ke kota Gresik dan berganti nama menjadi kabupaten Gresik sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

1. **Letak Geografis Dan Demografi**

Letak geografis Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya, ibu kota profinsi Jawa Timur, Kecamatan Kebomas berbatasan Langsung dengan Kota Surabaya, dan Kecamatan Gresik berada di sebelah utara Kecamatan Kebomas. Kecamatan Gresik sebagai pusat pemerintahan memiliki luas wilayah 554,29 Ha yang terbagi menjadi 21 desa dan kelurahan, dengan ketinggian daerah + 4 meter diatas permukaan laut, memiliki batas wilayah sebelah utara Kecamatan Manyar, sebelah timur Selat Madura sebelah barat dan selatan Kecamatan Kebomas. Jumlah penduduk di Kecamatan Gresik menurut hasil registrasi tahun 2017 adalah sebanyak 82.964 jiwa yang terdiri dari 41.298 Laki-laki dan 41.666 perempuan. Jumlah pekerja berdasarkan profesi adalah 336 orang dibidang pertanian, 8.303 orang dibidang industry, 31 orang dibidang konstruksi, 6.775 orang dibidang perdagangan, 69 orang dibidang angkutan, 2.416 orang dibidang jasa dan bidang lainnya sebanyak 15.050.[[33]](#footnote-33)

Jumlah Industri di Kecamatan Gresik sebanyak 502 industri yang terbagi menjadi 472 Industri Kecil/Kerajinan, 19 Industri sedang dan 11 Industri besar.

Berdasarkan kondisi perdagangan terdapat total 33 pasar dan 22 koperasi yang terbagi menjadi 25 Minimarket, 5 kelompok Pertokoan, 3 Pasar Tradisional, 10 KOSPIN (Koperasi Simpan Pinjam) dan 12 koperasi lain.

Kecamatan Kebomas memiliki wilayah seluas 3.006 Ha dengan ketinggian daerah + 4,5 meter diatas permukaan laut terbagi atas 186,0 Ha tanah sawah, 470,0 Ha pekarangan/halaman, 808,0 Ha tegal/kebun, 591,0 tambak, dan lainnya 951,0 Ha. Batas Kecamatan kebomas adalah di sebelah utara Kecamatan manyar, sebelah timur Kecamatan gresik, sebelah selatan kota Surabaya, dan sebelah selatan Kecamatan Cerme. Jumlah penduduk menurut catatan tahun 2017 sejumlah 107.923 jiwa terdiri atas 54.444 penduduk laki-laki dan 53.479 penduduk perempuan, jumlah penduduk yang bekerja menurut bidangnya yaitu, dibidang pertanian 1.170 orang, industri 28.309 orang, konstruksi 662 orang, perdagangan 4.924 orang, angkutan 986 orang, jasa 2.275 orang dan bidang lainnya 2.435 orang.[[34]](#footnote-34)

Jumlah Industri di Kecamatan Kebomas sebanyak 1.488 industri yang terbagi menjadi 1.375 Industri Kecil/Kerajinan, 63 Industri sedang dan 50 Industri besar.

Berdasarkan kondisi perdagangan terdapat total 66 pasar dan 57 koperasi yang terbagi menjadi 44 Minimarket, 16 kelompok Pertokoan, 6 Pasar Tradisional, 1 KUD, 29 KOSPIN (Koperasi Simpan Pinjam) dan 27 koperasi lain.

1. **Kondisi Sosial Keagamaan**

Dalam Kecamatan Gresik terdapat sarana pendidikan umum sebanyak 15 SD negeri dan 8 SD swasta, 4 SMP negeri dan 5 SMP swasta, 1 SMA negeri dan 5 SMA swasta, dan 2 Perguruan Tinggi swasta. Dan pendidikan islam sebanyak 10 MI, 1 MTs, 1 Perguruan Tinggi dan 1 Pondok Pesantren yang semuanya dikelola swasta.[[35]](#footnote-35)

Jumlah Sarana Kesehatan menurut catatan tahun 2017 terdapat 4 Rumah Sakit Umum, 5 Poli Klinik, 3 Puskesmas dan 1 Puskesmas pembantu, sebanyak 24 Dokter Praktek, 18 Praktek Bidan, 14 Poskesdes, 106 Posyandu, 21 Apotik dan 13 Toko Obat. Jumlah kejadian gangguan kesehatan menurut jenisnya adalah sebanyak 1.326 Muntaber/Diare, 27 Demam Berdarah, 2.849 Infeksi Saluran Pernafasan dan AID 1 kejadian.[[36]](#footnote-36)

Kondisi keagaman Kecamatan Gresik dapat dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan pemeluk Agama dan Kepercayaan, 81.110 orang memeluk agama Islam, 1.080 orang beragama Katolik, 36 orang beragama Protestan, 36 orang beragama Hindu, 245 orang beragama Budha, 36 orang beragama Khonghucu dan 2 orang memeluk Aliran Kepercayaan. Terdapat tempat peribadatan sebanyak 34 Masjid, 170 Surau/Musholla, 6 Gereja, 1 Pura, 1 Vihara dan 1 Klenteng.[[37]](#footnote-37)

Berdasarkan catatan tahun 2017, jumlah kejadian nikah dan cerai diKecamatan Gresik adalah sebanyak 623 pernikahan dan 137 talak dan perceraian, serta tidak ada kejadian rujuk.

Dalam Kecamatan Kebomas sarana pendidikan terdapat sebanyak 20 SD negeri, 2 SMP negeri, 1 SMA negeri, 41 Taman Kanak-kanak swasta, 6 SD swasta, 6 SMP swasta, 3 SMA swasta dan 3 Perguruan tinggi swasta. Jumlah sekolah Islam adalah sebanyak 2 RA, 10 MI, 4MTs, 3 MA dan 8 Pondok Pesantren yang semuanya dikelola oleh swasta.[[38]](#footnote-38)

Jumlah penduduk menurut pemeluk agama dan keyakinan yaitu, sebanyak 105.389 beragama Islam, 631 beragama Katolik, 1.658 beragama Protestan, 97 beragama Hindu dan 148 beragama Budha. Jumlah tempat peribadatan sebanyak 69 Masjid dan 220 Surau/Musholla serta 2 Gereja.[[39]](#footnote-39)

Jumlah kejadian nikah dan perceraian menurut catatan tahun 2017 adalah sebanyak 775 pernikahan dan 102 talak dan perceraian, dan tidak tercatat kejadian rujuk.

Jumlah Sarana Kesehatan menurut catatan tahun 2017 adalah sebanyak 2 Rumah Sakit Umum, 14 Poli Klinik, 2 Puskesmas dan 6 Puskesmas pembantu, 42 Dokter Praktek, 2 Rumah Bersalin, 30 Praktek Bidan, 14 Poskesdes, 3 Polindes, 134 Posyandu, 16 Apotik dan 22 toko Obat. Jumlah kejadian gangguan kesehatan menurut jenisnya adalah, 1.655 Muntaber/Diare, 31 DB, 5.267 Infeksi Saluran Pernafasan dan Campak 1 kejadian.[[40]](#footnote-40)

1. **Kondisi Sosial Politik**

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 107/kpts/KPU/TAHUN 2013 pada tanggal 19 Maret 2013 dapil 1 Kabupaten Gresik meliputi Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Kebomas dan tidak berubah untuk pemilu legislatif tahun 2019. Pada pemilu legislatif tahun 2014 di dapil 1 Gresik terdapat 12 partai politik yang mengikuti pemilu DPRD kabupaten/kota, sedangkan untuk tahun 2019 jumlah partai peserta pemilu dapil 1 bertambah menjadi 16 partai politik. Tercatat jumlah DPT sebanyak 75.938 pemilih di Kecamatan Kebomas, dan 61.312 pemilih di Kecamatan, total keseluruhan adalah 138.250 pemilih pada tahun 2019.[[41]](#footnote-41)

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomer 107/kpts/KPU/TAHUN 2013 pada tanggal 19 Maret 2013 Kabupaten Gresik dibagi atas 7 dapil (Daerah Pemilihan) dan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan umum tahun 2014 dan tidak berubah pada pemilihan umum tahun 2019, yang meliputi:

**Tabel 3.[[42]](#footnote-42)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **DAPIL** | **KECAMATAN** | **ALOKASI KURSI** |
| 1 | Gresik 1 | Gresik dan Kebomas | 7 |
| 2 | Gresik 2 | Menganti dan Kedamean | 7 |
| 3 | Gresik 3 | Driyorejo dan wringin anom | 7 |
| 4 | Gresik 4 | Duduk Sampeyan, Benjeng, Cerme dan Balong Panggang | 10 |
| 5 | Gresik 5 | Sangkapura dan Tambak | 4 |
| 6 | Gresik 6 | Dukun, Panceng dan Ujung pangkah | 7 |
| 7 | Gresik 7 | Manyar, Bungah dan Sidayu | 8 |

1. **Perolehan Suara PPP**

Di kabupaten Gresik Partai PPP merupakan partai yang cukup lama dan memiliki simpatisan yang cukup banyak, dapat dilihat pada tabel 4 pada pemilu legislatif tahun 2014 partai PPP pada peringkat ke 3 berdasarkan jumlah kursi yang didapat sebanyak 7 kursi dengan perolehan suara sebanyak 61.170 suara di DPR RI, 43.706 suara di DPRD Provinsi dan 64.128 Suara di DPRD Gresik.

**Tabel 4. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik tahun 2014[[43]](#footnote-43)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Partai Politik** | **DPR** | **DPRD PROV** | **DPRD GRESIK** | |
| Suara | Kursi |
| 1 | Partai Nasdem | 31.133 | 22.468 | 30.347 | 1 |
| 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 134.440 | 141.993 | 124.200 | 8 |
| 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 15.117 | 20.088 | 22.112 | 0 |
| 4 | PDI Perjuangan | 58.763 | 59.382 | 72.168 | 6 |
| 5 | Partai Golongan Karya | 144.763 | 74.175 | 149.320 | 11 |
| 6 | Partai Gerindra | 63.425 | 57.936 | 76.539 | 6 |
| 7 | Partai Demokrat | 32.849 | 51.062 | 57.173 | 6 |
| 8 | Partai Amanat Nasional | 30.627 | 41.083 | 49.535 | 5 |
| **9** | **Partai Persatuan Pembangunan** | **61.170** | **43.706** | **64.128** | **7** |
| 10 | Partai Hanura | 11.185 | 11.789 | 19.828 | 0 |
| 11 | Partai Bulan Bintang | 3.495 | 3.076 | 3.113 | 0 |
| 12. | PKP Indonesia | 6.332 | 8.568 | 7.898 | 0 |
| **Jumlah** | | 593.299 | 535.326 | 676.361 | 50 |

Pada pemilu tahun 2019 perolehan suara PPP menurun hampir di semua wilayah dan termasuk suara keseluruhan DPRD Gresik, dan tetapi di Dapil 1 terdapat kenaikan berikut dapat dilihat dari tabel 5 dan Tabel 6 perolehan suara PPP di DPRD Gresik dapil 1.

**Tabel 5. Perolehan suara parpol di Dapil 1 Kab. Gresik[[44]](#footnote-44)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Partai Politik** | **Tahun 2014** | **Tahun 2019** |
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 12.063 | 20.128 |
| 2 | Partai Gerindra | 7.261 | 18.022 |
| 3 | PDI Perjuangan | 14.572 | 6.881 |
| 4 | Partai Golongan Karya | 17.665 | 11.922 |
| 5 | Partai Nasdem | 1.847 | 6.244 |
| 6 | Partai Gerakan Perubahan | - | 370 |
| 7 | Partai Berkarya | - | 1.032 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 4.728 | 4.941 |
| 9 | Partai Persatuan Indonesia | - | 1.097 |
| 10 | **Partai Persatuan Pembangunan** | **8.823** | **9.256** |
| 11 | Partai Solidaritas Indonesia | - | 1.438 |
| 12 | Partai Amanat Nasional | 8.409 | 13.678 |
| 13 | Partai Hanura | 1.183 | 125 |
| 14 | Partai Demokrat | 10.493 | 7.744 |
| 15 | Partai Bulan Bintang | 434 | 668 |
| 16 | PKP Indonesia | 3.432 | - |
| **Jumlah Suara** | | 90.910 | 103.546 |

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada saat melakukan penelitian dilapangan terdapat beberapa kendala yang dialami peneliti, sehingga kurang peneliti merasa kurang maksimal dalam menggali informasi, beberapa kendala yang dihadapi adalah padatnya kesibukan informan dari kalangan caleg perempuan dan sebagian tokoh masyarakat, peneliti juga tidak berhasil menjadikan Caleg No 2 yaitu Ibu Azizah Febriyanti sebagai informan karena sangat sulit dihubungi, dan akses yang terbatas.

Masuk pada Penyajian Hasil Penelitian dan Pembahasan, perlu ditampilkan kembali rumusan masalah sebagai pedoman dalam menyusun penyajian hasil penelitian yang kemudian akan dijawab dengan berbagai data yang ditemukan dan akan dikaitkan dengan konsep dan teori yang ada. Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk dukungan yang diperoleh dan kendala yang dihadapi caleg perempuan PPP pada pemilu legislatif tahun 2019 di Dapil 1 Kabupaten Gresik?
2. **Bentuk dukungan yang diperoleh caleg perempuan PPP**

Dalam konteks penelitian ini caleg-caleg perempuan PPP juga menghadapi hambatan dan juga mendapat dukungan. Laki-laki yang sering dikatakan menjadi penghambat kemandirian perempuan, dalam hal ini justru menjadi penyemangat dan dapat menjadi pendorong utama bagi perempuan untuk terjun di dunia politik, sebagaimana yang dialami Ibu Siti M. ketika menjadi calon anggota legislatif di Dapil 1 Kabupaten Gresik, meskipun akhirnya ia tidak lolos, ia mengatakan :

Ya istilahnya semuanya mendukung, dari teman, saudara dengan ikut mengkampanyekan ke teman kerja mereka ... Suami waktu itu mengira pencalegkan saya itu bercanda karena saya asalnya bukan orang partai, tp setelah semua proses pendaftaran selesai, suami agak kaget, tapi akhirnya mendukung juga ikut membantu sosialisasi.

Demikian juga yang dialami Ibu Lilik H, sebagai caleg dan juga inkumben merasa bahwa apa yang telah dicapainya tidak lepas dari dukungan orang-orang terdekatnya :

Berkat dukungan dari kluarga dan teman-teman, baik dukungan moral maupun materi, pada tahun 2019 saya baru pertama kali mencalonkan diri untuk menjadi Anggota legilatif melalui partai Kebangkitan Nasional Ulama, Alhamdulillah saya berhasil memperoleh suara terbanyak.

Dukungan moral dan materi yang diterima Ibu Lilik H. dari keluarga dan suaminya sesuai dengan apa yang disampaika oleh Bpk Abdur Rohman, yang masih bertetangga dengan Caleg nomor 1, demikian beliau menyampaikan:

Bu Lilik ya, suaminya pengusaha, dia nyaleg sudah tiga kali jadi kalau gk salah, sudah 3 periode ya, jadi kalau memang suaminya mengijinkan bahkan di danai dia itu, disupport, gak apa-apa selama suami mengizinkan.

Dari beberapa hasil wawancara di atas membuktikan bahwa bagi caleg-caleg perempuan mendapat restu dan dukungan dari keluarga dan orang terdekat. Dan dukungan tersebut sangat berdampak bagi karir mereka.

Selain mendapat dukungan dari keluarga, caleg perempuan PPP juga mendapat dukungan dari internal PPP yang mencalonkan mereka. Pengalaman Ibu Siti M. menjadi Caleg berawal dari ajakan Internal PPP yang merupakan teman sesama Alumni Pondok Mambau Sholihin, ia mengatakan :

Pak Huda ini kan orang PPP teman di Mambaus Sholihin alumni Mambaus Sholihin, terus ini ngobrol pas waktu itu ada keluhan guru honorer, ngobrol lama (WA) pas bulan rhomadlon, terus ditawari, gk pengen tah ikut nyaleg, kan caleg kan identik dengan money politik, terus saya bilang aku loh gk duwe bondo, bondo opo, gk atek bondo pokok,e syarat,e wedok, syaratnya perempuan, akhirnya yawes gapapa, deal ya, nanti ada pertemuan samean ngisi formulir, terus ada pertemuan itu, ngisi formulir melengkapi pakta integritas, itu .... ya baru ini jadi anggota parpol begitu ikut caleg otomatis jadi anggota.

Bentuk dukungan lainnya yang juga didapatkan oleh Ibu Siti M diantaranya bantuan stiker dari PPP dan adanya teman dan saudara yang menjadi relawan kampanye. Ia megatakan :

Dari PPP dapat bantuan stiker buat kampanye atau sosialisasi .. Untuk mempromosikan diri ya sekedar stiker banner dan saudara, teman2 (mulut ke mulut).

Dalam partai PKB pun demikian, caleg perempuan juga dimudahkan untuk menjadi caleg, diajak dan diberi dorongan untuk memenuhi kuota 30%, seperti pengalaman Ibu Ainul Farosida ketika dulu ikut bursa caleg, perempuan-perempuan yang ingin terjun ke dunia politik sangat didukung, ia mengatakan :

Klw di PKB sendiri ada Prioritas. Terkait perempuan prioritas itu maksudnya begini semua dapil itu memang harus ada caleg perempuan nya dan yg priotitas ini ditakoni maksudnya, nyaleg temen apa tidak, kalau ndak serius gak usah bondo, nyetor persyaratan aja. Intinya untuk mendokrak suara saja. Klw memang dia itu caleg potensial dalam artian ditarget untuk bisa mewakiki di dapil tersebut, ya dia harus bekerja keras harus punya tim dan kerjasama.

Dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa dukungan partai PKB dalam hal rekruitmen caleg perempuan sangat terbuka, bagi caleg perempuan yang serius dituntut untuk berusaha keras dan mengeluarkan moda, namun disisi lain sebagian caleg perempuan digunakan untuk mendongkrak suara saja, hal tersebut disadari atau tidak telah menjadikan caleg perempuan sebagai pelengkap atau subordinat, untuk melengkapi formasi caleg disebabkan peraturan tentang kuota 30% perempuan dan untuk mendongkrak suara.

Namun bagi caleg perempuan yang sudah berpengalaman, sudah pernah menjabat tetap ada pendukung yang setia, hal tersebut karena terdapat hubungan dan silaturahim atau yang diistilahkan oleh Ibu Ainul F dengan kata “Ngramut”, yang berkelanjutan antara caleg perempuan dengan simpatisan, salah satu simpatisan Ibu Lilik sebagai Caleg Nomor 1 dan Inkumben, Bpk Susilo menyampaikan :

Aku wes Bu Lilik tok, meskipun wes dadi ngono yo, beliau tetep .. trus janji janjine gk spiro mbleset (tepat janji), seng wes-wes wong mari mlebu ngono kan ngewehi harapan-harapan tok, marine dadi yo wes gk ono opo-opoe (gk ngasih apa-apa) kebanyakan ngono ...

Nek wonten caleg perempuan kaleh laki-laki seng podo kemampuan,e ngoten, jenengan condong seng pundi, laki-laki toh perempuan? (peneliti bertanya)

Kadang wong seng gk terlalu kenal mlebu ngono ... seng kiro-kiro trackrecord,e apik nang wong apik, mlebu ngono jek ditrima ... koyo Nur Hamim biyen sak durunge dadi kan merakyat ... sampe saiki tetep, de,e kan termasuk ketua pedagang-pedagang, trus ceritone konco-konco seng dwe lapak kaki lima nang GKB kono seng diobrak-obrak iku yo digolekno solusi, tetep memperjuangkan, nang gonku suorone stabil.

Pernyataan informan diatas menjelaskan bahwa siapapun anggota legislatif yang mau menepati janjinya dan tetap berhubungan baik dengan masyarakat akan tetap didukung. Sementara Caleg perempuan selain Ibu Lilik H, caleg nomor 2 dan 3, sebagian besar masyarakat tidak mengenal mereka.

1. **Kendala yang dihadapi caleg perempuan PPP**

Meskipun mendapatkan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat, caleg-caleg perempuan PPP dan caleg perempuan umumnya, namun disisi lain ketika mereka terjun ke ranah publik terdapat pula kendala dalam rumah-tangga mereka sendiri, karena caleg perempuan tersebut mengemban suatu tugas di luar namun mereka tetap harus menyelesaikan pekerjaan mereka dalam rumah. Keadaan demikian disebut *double burden* atau beban ganda, perempuan yang taat pada suami kebanyakan mereka dibolehkan memiliki urusan diluar rumah dengan syarat harus menyelesaikan tugas dirumah, meskipun ada pembantu rumah tangga, para suami tetap menghendaki agar istri tetap mengambil tanggungjawab dirumah. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Ainul F, yang merupakan Kepala sekolah MI Ma’arif di Kebomas dan pernah menjadi Caleg, ketika peneliti menanyakan pemaknaannya terhadap ayat kepemimpinan laki-laki ia mengatakan :

Ayat itu menjelaskan bahwa laki2 diciptakan lebih diutamakan dari perempuan, ayat itu adalah diimplementasikan di tingkatkan domestik, misal perempuan jadi presiden, setinggi-tingginya jadi presiden kalau pulang ya nurut dengan suaminya, jadi bagi kita di wilayah publik keduanya setara punya kesempatan yg sama untuk berguna bagi masyarakat. Tapi kalau sudah pulang bagaimanapun harus nurut sama suaminya. Ayat2 itu adalah sket2 dalam tataran domestik. Jadi kalau teman2 perempuan bergerak diruang publik berarti harus sudah mendapat izin dari suami. Kalau tidak diizinkan ya dirumah saja.

Pernyataan diatas yang menjelaskan adanya beban ganda bagi perempuan yang masuk ke ranah publik termasuk para politisi perempuan gambaran realita tersebut dikuatkan dengan keterangan Bpk Abdur Rohman, ketika ia bercerita tentang Ibu Lilik , beliau menyampaikan demikian :

Jadi kalau memang suaminya mengijinkan bahkan di danai dia itu, disupport, gak apa-apa selama suami mengizinkan. Itu pun ya sebagai seorang perempuan, itu pun harus bisa membagi waktu kapan untuk keluarga, kapan untuk suami, kapan ia harus melaksanakan tugasnya sebagai dewan misalnya.

Tidak hanya menghadapi permasalahan beban ganda tetapi juga terdapat banyak kendala lainnya, caleg perempuan dan perempuan pada umumnya terbatasi geraknya oleh pemahaman masyarakat terkait kondisi alamiah atau kodrat mereka sebagai perempuan, bahwa perempuan memiliki hak mengandung, melahirkan, menyusui, dan melayani suami, disisi lain, kaum laki-laki sebagai suami merasa keberatan apabila perempuan harus masuk ke ranah publik karena akan mengganggu kestabilan keluarga, hal tersebut. Menurut Bpk Siswanto, kalau perempuan meninggalkan tugas dirumah maka akan mengganggu kestabilan keluarga dan berdampak bagi anak dan akan mengorbankan generasi muda, demikian beliau menuturkan :

Kan gk bisa disamakan hak laki-lki dan perempuan, wanita itu punya hak untuk hamil, melahirkan, menyusui, tapi jaluk podo, seng rusak sopo akhire, anak yo kan, kalau anak rusak otomatis generasi, kan gk sadar mrembetan,e (dampaknya) ngonolo, kalau wanita disibukan aktifitas kepemimpinan, seng dadi ibu sopo, seng didik anak-anak sopo, korban generasi.

Sebagaimana teori *Nature* melihat perbedaan laki-laki dan perempuam adalah kodrat yang harus diterima, dan perbedaan biologis tersebut memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara laki-laki dan perempuan memiliki tugas yang berbeda sesuai kodrat masing-masing, namun ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan yang tidak terikat kodrat. Sependapat dengan penuturan diatas Bpk Dimyati memandang bahwa keberadaan seorang perempuan di rumah sebagai istri dan sebagai ibu sangat diperlukan, dan sangat penting perannya daripada peran perempuan diranah publik. Beliau mengatakan :

Dulu istri saya kerja, saya cukup mampu untuk meghidupi, lebih baik istri saya berhenti, karena apa, saya ndak mau anak-anak saya diasuh oleh pembantu, trus kalau saya kerja istri saya kerja, siapa yang ngemong anak, ngantar sekolah kan pembantu akhirnya ... disamping itu anak harus dididik agama, titip anak, gk bisa, peran orang tua itu ... Kalau anak dititipkan ke neneknya? kalau neneknya mampu ya gak masalah, cuman bagaimanapun pengaruh terhadap jiwa anak itu, itu yang harus dijaga. Sekarang contohnya saya sendiri sudah punya cucu ya, cucu itu kantil (erat) sama saya, sama ibunya gak sebegitu akrab, ini kesalahan saya juga, juga kesalahan anak saya, kebetulan laki-laki perempuan kerja anak saya, tak suruh keluar ya gk mau, tapi yang satu bidan juga, sudah keluar, kamu (anaknya) tak bilangi enak mana anakmu diasuh kamu sendiri atau diasuh pembantu, kedua hasilmu tiap bulan buat biaya pembantu dan transportasimu itu untung berapa, ruginya kedepan anak-anakmu kasian, diasuh pembantu, walaupun sekarang banyak penitipan anak tapi saya ndak yakin, pandangan pribadi saya kurang pas.

Beberapa penuturan yang didapat oleh informan diatas dalam masyarakat sering menjadi rambu-rambu untuk perempuan sebelum memasuki dunia luar, membuat mereka benar-benar harus memperhitungkan matang-matang sebelum melangkah, tidak sedikit menimbulkan kekhawatiran timbul dampak yang beresiko bagi kehidupan keluarga. Hal tersebut bisa menjadi positif dan juga bisa menjadi negatif tergantung bagaimana perempuan menyikapi.

Disisi lai terdapat pula hambatan berupa pandangan miring dari masyarakat berupa stereotipe yang dilebelkan pada perempuan, membuat banyak orang meragukan kemampuan memimpin seorang perempuan, dikatakan bahwa perempuan fisiknya lemah, berfikir dengan emosi dan perasaan dan kurang memiliki logika, sehingga akan berdampak tidak baik dalam mengambil keputusan, seperti pandangan Bpk Siswanto :

Wong wedok iku kan seneng mengedepankan perasaan, yo memang seh memang banyak yang pro dengan kepemimpinan laki-laki ya, tapi dalam hal jadi bupati presiden, tapi kalau sudah jadi hakim masih banyak kan simpang siur pro kontranya, karena kalau jadi hakim main perasaan, iki nek tak hukum la anak,e pye, ki tanggungjawab,e pye ka wong ki bojone lo wes mati, iki nglakoni doso la nek tak hukum anak,e pye, perasaan yang muncul bukan benar salahnya.

Pendapat diatas dapat dikatakan sebagai sebuah stereotip, menggambarkan perempuan dengan sifat yang mengedepankan perasaan, dan dapat mengganggu dalam pengambilan keputusan karena perasaan tidak dapat menentukan benar dan salah, stereotipe seperti itu merupakan salah-satu hal yang membuat profil caleg perempuan jatuh dalam pandangan publik.

Selain hambatan yang berhubungan dengan status mereka sebagai perempuan, mereka sebagai caleg juga memiliki hambatan lainnya, seperti sulitnya membagi waktu dalam pekerjaan mereka dan juga sebagai caleg. sebagaimana yang di alami Ibu Siti M. karena menjadi caleg adalah pengalaman baru bagi beliau, karena kesibukannya sebagai tenaga pengajar maka sangat sedikit proses sosialisasi atau mengambil hati masyarakat yang dilakukannya, dan niatannya menjadi caleg karena sekedar coba-coba karena ada ajakan dari internal partai. Akibatnya dukungan dari masyarakat pun tidak banyak diperoleh, ia mengatakan :

Kendalanya adalah saya sendiri kurang maksimal dalam sosialisasi karena kendala waktu. Tp karena saya kemarin itu kurang maksimal ya. ... Pada saat ada pertemuan2 rutin misal undangan pengajian, arisan, bahkan saya tidak berusaha secara langsung untuk promosikan diri meskipun teman2 mendorong saya. Saya berpikir kalau orang2 mau memilih saya ya Alhamdulillah, kalau tidak mau ya kenapa saya harus memaksakan.

Terkadang sebagai caleg mereka menghadapi kendala harus berhadapan dengan kelompok masyarakat yang transaksional, dengan terang-terangan menukar hak suara mereka, sebagaimana pengalaman Ibu Siti M, ia mengatakan :

Soalnya kalau sosialisasi, kita kan GK munafik ya, kalau mau dipilih pasti ngasih apa dan bukan rahasia umum, Misalnya seperti digrub wa, ayo mbak muna kok GK sosialisasi, barangkali mau ngasih darbuka (alat musik), atau seragamnya ibu2, sudah dimintai gitu. Trus mohon maaf mbak muna ada Bu amanah dari Demokrat ngasih 1 JT, mbak muna mau ngasih berapa Monggo nanti suaranya dibagi.

Sikap masyarakat yang cenderung suka bertransaksi tersebut menandakan bahwa beberapa kelompok masyarakat tidak membedakan caleg laki-laki maupun perempuan juga menggambarkan bahwa mereka tidak mempercayai janji-janji kampanye dari caleg, Ibu Siti M menambahkan :

Jadi, menurut saya bukan masalah laki2 perempuan. Tp berapa besaran yg akan diberikan ... Seumpama dari sini diterima dari sana diterima, trus yg dipilih siapa. ya monggo kalau mereka janji mau memberikan suaranya, tp GK mungkin karena semuanya diterima ... Pengalamannya PK nur Kholid. Dulu DPRD Gresik . Nyaleg di DPRD provinsi pun tidak jadi. Itu katanya, padahal saya sudah memberikan shodaqoh politik 150 JT.

Kemudian peneliti bertanya, Apakah tidak ada harapan atas janji2 politik setelah jadi? dan beliau menjawab :

Menurut saya Ndak. Karena mereka berpikir, kalau sudah jadi pun belum tentu ingat, yg penting sudah dapat uang. Apapun janjinya gk diingat (gk penting) ... Ada breefing dari partai, kalau memang bapak/ibu tidak ada sesuatu yg diberikan, janji yg bisa dibuat pegangan, panjenengan ke kelurahan ke kepala desa apa yg diperlukan ttd diatas materai.

Menurut hasil wawancara diatas pola pikir masyarakat yang cenderung praktis memaksa jalannya pemilu menjadi tidak bersih, dan polemik ini bisa menjadi hambatan sekaligus keuntungan dalam kesempitan bagi pelaku politik kotor.

Keadaan masyarakat yang cenderung memilih money politik tergambar dengan hasil wawancara dengan informan yang tinggal di Kelurahan Klangonan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Berikut pembicaraan dengan informan, No Name 2 :

... gak ono seng ngewehi duwek mosok nyoblos yo, nek diwehi dwet yo berangkat (mencoblos).

La sampean wingi golput nopo? (peneliti)

Gk ono seng ngewehi dwet, gk ono seng nyangoni, disangoni yo brangkat, kono enak, kene gak enak, kono dadi enak-enak seneng-seneng.

La wingi nopo gk ono seng nyangoni? (peneliti)

Gk ono seng nyangoni kok, gak ono... kene nyoblos, kono 50 ribu berangkat ... wingi iku gk ono seng nyangon-nyangoni, ditangkap jarene ngono dadine gak ono seng nyangoni. Gk ono seng wani mego gresik ki akeh seng di tangkap.

Selain hambatan terkait money politik, terdapat hambatan lain seperti banyak warga yang tidak mengenal caleg perempuan PPP karena beberapa lokasi kurang mendapatkan perhatian caleg dan juga partai pengusung, bahkan di sekitar kantor DPC PPP sendiri banyak warga yang tidak mengenal sosok caleg, hanya mengetahui nama dan gambarnya. Sebagaimana penuturan warga di sana yang tidak mau disebutkan namanya, No Name 1 :

Koyo iki yo, kantore nang kene, iso-iso serawung (kalau bias akrab) karo warga kita, iki Cuma rapat deg ilang, dadi gak ono, seng endi jenenge Bu Lilik iku gk eroh, nek Randuagung kemungkinan akeh seng kenal, kene kantore nang kene, nek gk tim sukses,e gk iso kenal.

Keterangan warga tetangga kantor DPC PPP diatas menandakan, bahwa proses sosialisasi kurang optimal, hal tersebut menjadi kendala meraih dukungan masyarakat. Bahkan seharusnya warga sekitar kantor PPP mendapat perhatian lebih, agar lebih banyak dukungan dari masyarakat.

1. Bagaimana penerimaan caleg perempuan PPP pada pemilu legislatif tahun 2019 dalam pandangan Masyarakat di Dapil 1 Kabupaten Gresik?
2. **Bentuk Penerimaan Terhadap Caleg Perempuan**

Terkait keberadaan caleg perempuan ditengah masyarakat selain mendapatkan dukungan juga memunculkan beragam sikap dan pandangan dari masyarakat, mulai dari yang pro dan kontra, ada yang menyikapinya dengan penerimaan positif dan ada pula yang memandang negatif, bagi sesama perempuan, adanya caleg perempuan menjadi suatu kebanggaan bagi kaum mereka, Bu Ainul F memiliki kesan positif terhadap caleg PPP No 1, ia mengatakan :

Bu Lilik dulu sampai sekarang ketua muslimat. Menurut saya Bu Lilik itu memang disiapkan untuk jadi potensial karena sudah incumben, selain Bu Lilik itu tidak terlalu berefek terkait penomoran. Kita cukup dekat dengan PPP dan biasa ngumpul dan GK pernah konflik, untuk periode ini PPP agak merosot karena ada kasus Romy. Bu Lilik ini posisinya kuat karena orangnya merawat konstituennya.

Meskipum Ibu Ainul F menyampaikan kelebihan Caleg no 1 PPP, namun ia juga menyampaikan beberapa kekurangan yang dimiliki personal Caleg tersebut, dengan mengatakan :

Bu Lilik orangnya baik supel, tp terkait kebijakan2 ini masih kurang, ya mohon maaf, secara intelektual masih kurang mumpuni, tp dia Istiqomah dan ngramut konstituen, namun secara kedinasan tidak terlalu menjadi decision maker, tp selebihnya kepada masyarakat dia baik.

Ibu Siti M sebagai orang baru dalam PPP melihat personal Ibu Lilik sebagai senior yang baik, ia berkomunikasi beberapa kali diwaktu-waktu sebelum pemilu berlangsung dan beberapa kali bertemu dalam rapat, ia mengatakan :

Bu Lilik orangnya supel, meskipun inkumben tidak sombong, sama kita biasa saja Ya sebagai teman di partai, baru di partai ini jadi agak dekat, kalau mau ada kegiatan, beliau infokan

Beberapa informan juga mendukung dan tidak mempermasalahkan dengan adanya caleg perempuan. Seperti pandangan Bpk Agus S. Meskipun dia tidak memilih caleg perempuan tp dia sangat mengapresiasi adanya caleg perempuan beliau mengatakan :

Kan gini mas, indonesia kan penduduknya kan banyak wanita daripada laki-laki, lo kenapa kok tidak, kan perempuan kan barangkali tau juga perasaannya antar perempuan, la kalo laki kan barangkali kemauannya keras, suara perempuan tidak didengarkan, la kalau perempuan kan mungkin perasaannya tinggi podo-podo perasaannya yo gk popo aja kalo saya, pemimpin perempuan gpp yang penting faham betul dengan keadaan yo kan gk masalah, lawong kalau kita memaksakan kehendak yo gk bisa, ya kalau pribadi saya ya gapapa, lawong ditempat saya kepala sekolahnya perempuan kok.

Tapi dengan adanya caleg laki-laki dan perempuan, lebih manteb yang mana (untuk dipilih)? (informan bertanya).

Ya kalau saya pribadi laki ya pasti laki mas, tapi kasihan kan kalau perempuan didiskriminasi kan gak boleh, monggo saja … kalau dia mampu kenapa tidak.

Demikian beberapa dari kalangan masyarakat dan tokoh masyarakat memberikan pandangan terkain kepemimpinan perempuan, terutama dalam hal ini adalah caleg perempuan, mereka tidak mempermasalahkan jenis kelamin, yang penting siapa yang maju di arena politik harus memiliki kemampuan dibidang tersebut, dan dapat mengambil hati masyarakat untuk mendapatkan dukungan.

Terdapat penjelasan yang lebih jauh mengenai hubungan rumah tangga laki-laki dan perempuan, bahwa sesungguhnya seorang suami memiliki kewajiban lebih besar dari pada istrinya, Bpk Umar T menjelaskan :

Mencuci tugasnya siapa, seng wajib nyusoni sopo, nek gk ngaji gk ngerti, seng wajib nguripi anak iku sopo, nyusoni termasuk ?

Ibu kewajibane Cuma nyiapno iki (kebutuhan biologis suami), dikumpuli disetubuhi, begitu lahir anaknya bapak, bin-nya bin- siapa (nasab dan keturunan) yang melahirkan siapa tapi anaknya siapa (ayah), seng wajib nyediani sandang pangan papan sopo (ayah), berarti nyusoni sopo, (ayah) jeru yo (tingi kan nalarnya), makane banyak-banyak saaken karo wong wedok. Tugase mencuci ngurusi iku ya wong lanang,

saya terus terang kalau ngajar mau ada orang ngaji itu pamit sama istri saya, umi,e iki ono wong ape ngaji yo,opo, karena saya biasanya nyuci, masak, nyuci masak tanggung jawabnya orang laki itu, tanggung jawab ngekei mangan sopo, tapi mego saking apik,e bojo (istri) dia bantu ngurusi tugas rumah tangga.

Penjelasan tersebut sangat dalam pemaknaannya dan sulit dipahami pada awalnya, penjelasan bapak Umar menggambarkan bahwa suami punya tanggungjawab sangat besar dalam rumah tangga, dan kewajibannya juga lebih besar dalam mengurus anak, tetapi karena perempuan itu manusia yang baik maka dia bersedia membantu laki-laki mengerjakan tugas-tugas rumah tangga.

Demikianlah gambaran pandangan masyarakat terkait perempuan dan bagaimana penerimaannya dalam masyarakat

1. **Bentuk Penolakan Terhadap Caleg Perempuan**

Sikap Masyarakat banyak pula yang tidak setuju dengan keputusan perempuan untuk masuk ke dunia politik dengan menjadi calon lagislatif kebanyakan dari mereka adalah laki-laki, bentuk penolakan tersebut beragam ada yang dengan tegas menolak, ada yang menolak dengan bijak dan ada yang mengatakan sah-sah saja perempuan masuk ke dunia politik, tetapi tetap memilih caleg laki-laki dalam pemilu. Beberapa penolakan disertai argumen-argumen diantaranya seperti yang dituturkan oleh Bpk Dimyati :

kamu (anak) tak bilangi enak mana anakmu diasuh kamu sendiri atau diasuh pembantu, kedua hasilmu tiap bulan buat biaya pembantu dan transportasimu itu untung berapa, ruginya kedepan anak-anakmu kasian, diasuh pembantu, walaupun sekarang banyak penitipan anak tapi saya ndak yakin, pandangan pribadi saya kurang pas.

Bpk Dimyati berargumen bahwa perempuan harus dirumah karena ada anak yang harus dirawat dan biarkan sang suami yang mencari penghidupan, serta mempasrahkan kepemimpinan ditangan laki-laki, beliau mengatakan :

Kalau masih ada laki-laki perempuan dirumah saja, dimanapun, maupun dirumah sebaiknya pemimpin itu laki-laki ... dalam hal agama, laki-laki itu diciptakan untuk jadi pemimpin, dirumah maupun diluar rumah atau masyarakat, lawong dirumah saja pemimpinnya laki-laki apalagi di masyarakat, apalagi presiden

Penolakan lainnya disampaikan secara tegas oleh Bpk Siswanto, beliau mengatakan :

Kalau saya tetep, bahwa kepemimpinan perempuan itu sesuatu yang terpaksa, da pemimpin perempuan itu maju juga karena kesalahan daripada laki-laki, kenapa kok maju karena laki-laki dianggap tidak mampu untuk memimpin ... kepemimpinan itu tetep, urusannya laki-laki, karena Allah Melebihkan kaum laki-laki, yakan, yang umum itu yang diadopsi itukan di an Nisa ayat 24 Arijalu Qowamuna alannisa, kalau dari situ aja udah, rentetannya disitu kan buanyak, yaitu tetep bahwasane kepemimpinan itu, apa lagi urusan desa, uruan kecamatan, urusan kepresidenan, tetep laki-laki.

Dari sekian pandangan masyarakat dapat dilihat masih terdapat Subordinasi terhadap kaum perempuan, terkadang pemaknaan terhadap ajaran agama membawa kepada keputusan untuk menempatkan perempuan sebagai pelengkap laki-laki, situasi masyarakat yang tetap menganggap bahwa segala urusan didalam rumah dan menjaga anak adalah tugas perempuan, menggambarkan keadaan dimana terjadi Subordinasi. Inilah salah satu faktor yang membatasi gerak perempuan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, memang seseorang tidak bisa lepas dari pengaruh sosial, begitupun dalam meniti karir, seseorag akan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk menentukan jalan kehidupannya, begitupula caleg-caleg perempuan, membutuhkan motivasi dan dukungan untuk tetap teguh bertanding di kancah perpolitikan.

Bagi perempuan umumnya, mereka tidak mempunyai pilihan-pilihan untuk menentukan nasibnya karena mereka dibatasi ruang geraknya dalam bermasyarakat oleh laki-laki dalam ikatan keluarga baik ayah, saudara laki-laki dan suami. Disisi lain banyak pula perempuan-perempuan yang memiliki harapan tertentu dan mampu menggapainya, hal tersebut tidak lepas dari dukungan keluarga, maka setiap kesuksesan yang diraih dipengaruhi bagaimana keluarga memberikan dukungan dan motifasi.

Perempuan-perempuan yang hadir dalam kancah perpolitikan pun tidak muncul begitu saja, ada banyak tantangan-tantangan dan ada pula dorongan dan motivasi yang membuat mereka mau untuk terjun pada dunia yang dianggap maskulin oleh banyak orang. Caleg-caleg perempuan PPP dapil 1 dalam penelitian ini pun demikian, mendapat dukungan dan juga kendala, mendapat sambutan baik dari masyarakat dan juga penolakan, selanjutnya bergantung kesiapan mental, kecakapan, bagaimana strategi bersosialisai kepada masyarakat agar mendapat dukungan menjadi anggota dewan.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. **Dukungan Dan Kendala**

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dan dianalisa, didapatkan kesimpulan bahwa caleg perempuan dapil 1 Kabupaten Gresik parpol PPP dalam langkahnya mengikuti kontestasi politik mendapat dukungan dari banyak pihak, dukungan mereka peroleh adalah dari keluarga, saudara dan teman serta partai PPP sendiri berbentuk dukungan motivasi, dana kampanye, bantuan sosialisasi dari mulut kemulut, alat atau fasilitas sosialisasi/kampanye.

Caleg perempuan juga mendapatkan beberapa kendala dalam prosesnya menjadi caleg, Kendala-kendala tersebut umumnya tidak lepas dari status mereka sebagai perempuan. Bentuk kendala yang dihadapi diantaranya adalah beban ganda karena mereka punya tugas dirumah dan sebagai caleg atau anggota legislatif nantinya, permasalahan *nature* perempuan yang memaksa mereka menerima pembagian kerja berkaitan dengan kodrat mereka. Masih terdapat stereotipe atau pelabelan sifat-sifat lemah, emosional, perasa pada perempuan dari masyarakat. Adanya pola subordinasi dalam lingkup masyarakat maupun keluarga.

1. **Bentuk Penerimaan Masyarakat**

Bentuk penerimaan dari masyarakat gresik terhadap caleg perempuanpenerimaan positif umumnya dari sesama perempuan terutama sesama caleg perempuan. Kehadiran caleg perempuan dalam kontestasi politik oleh sebagian perempuan dipandang sebagai misi pemberdayaan perempuan dan ajang pembuktian bahwa perempuan bisa.

Sedangkan penerimaan negatif atau penolakan lebih banyak disampaikan oleh kaum laki-laki, mereka menganggap bahwa kepemimpinan perempuan bersifat terpaksa, kalau masih ada laki-laki tidak perlu pemimpin perempuan, maka perempuan adalah cadangan, caleg perempuan dianggap tidak dapat membuat keputusan yang baik dan menentukan benar salah.

1. **SARAN**
2. Saran yang ingin peneliti sampaikan adalah agar ada proses rekruitmen yang selektif dalam menentukan caleg, tidak hanya sekedar mengisi kuota 30%. Sehingga caleg terutama caleg perempuan yang ada dapat meyakinkan masyarakat bahwa mereka mampu.
3. Terkait penerimaan yang beragam baik positif maupun negatif, agar semua pihak dapat menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, maka selayaknya

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU :**

Astuti, T. M. P. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Kauntitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung:Alfabeta)

Faisal, Sanapiah. 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasinya.* (Malang: Yayasan Asah-Asih-Asuh)

Miles. Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992, *Analisis Data Kualitatif.* (Jakarta: UI Press)

Syarifuddin Jurdi, 2013, *Sosiologi Nusantara; Memahami Sosiologi Integralistik* (Jakarta:Kencana)

Ratna Megawangi, 2001, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan)

Umi Sumbulah. dkk. 2008, Spektrum Gender; Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi (Malang: UIN Malang Press)

Miriam Budiardjo, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka)

Rosidawati, Imas. 2004. *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kesiapan Partai Politik dan Perempuan Indonesia di Area Politik*

Fakih, Mansour. 2005. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

**JURNAL :**

Nurul Hidayati, 2015, “Beban Ganda Perempuan Bekerja; Antara Domestik dan Publik”, *Jurnal Muwazah,* Vol.7 No. 2

Wahid, U. 2013. „Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012‟. *Malaysian Journal of Communication. Vol. 29 issue 1*,

Suciptaningsih, O. A. 2010. „Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Kendal‟. *Jurnal Komunitas.* Vol. 2 No. 2.

Dede Wiliam de Vries dan Nurul Sutarti, 2009, “Adil Gender, Mengungkap Realitas Perempuan Jambi”, *Journal Center for International Forestry Research*, No.29b

**INTERNET :**

Surabaya.tribunnews.com-Perempuan Gresik Kritik Dominasi Pria Dari Pemerintah Pusat Sampai RT,Senin 30 Maret 2015

Praktis.[http://www. Uninus.ac. Id.](http://www.uninus.ac.id/) (2 Sept. 2014).

Id.m.Wikipedia.org/wiki/Sunan Gresik. 12 Juli 2019

Gresikkab.go.id/Profil/Sejarah. 13 Juli 2019

Kecamatan Gresik Dalam Angka, 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik.

Kpud-gresikkab.go.id

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitumgan Perolehan Suara. KPU 2014 & 2019

**Struktur Kepengurusan PPP**

Masa kepengurusan DPC PPP Gresik diperbaharui setiap lima tahun sekali. Berikut adalah data susunan Pengurus Harian DPC PPP Gresik masa bakti 2016-2020:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ketua** | : H. Achmad Nadir |
| Wakil Ketua Bid. Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi | : H. Murtadlo Nur, SH |
| Wakil Ketua Bid. Agama dan Dakwah Pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh wakaf | : Zainul Arifin, S.Ag |
| Wakil Ketua Bid. Hubungan Kerjasama Antar Lembaga | : Su’id |
| Wakil Ketua Bid. Advokasi Hukum Dan Ham | : Akhmad Syafa’, SH |
| Wakil Ketua Bid. Teknologi, Informasi Media dan Komunikasi | : H. Hilaludin |
| Wakil Ketua lingkungan Hidup dan Penangulanggan Bencana Alam | : Indah Ning Nuranisa |
| Wakil Ketua Bid. Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak | : Dra. Hj. Hatimmah |
| Wakil Ketua Bid. Ekonomi, Penembangan Koperasi dan Kewirausahaan | : H. Saiful Huda |
| Wakil Ketua Bid. Pendidikan, seni budaya Dan Pariwisata | : Drs. Imam Sya’roni |
| Wakil Ketua Bid. Pemudan dan Olahraga | : H. Syafiqi M.Zain |
| Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil I | : Marwan, S.Pd.I |
| Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil II | : H. Asyari, S.Ag,MM |
| Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil III | : H. Sumardi, Ba |
| Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil IV | : Mustaqim, S,Pd.I |
| Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil V | : H. Muntarifi, SE |
| Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil VI | : H. Ahmad Khusnairi |
| Wakil Ketua Bid. Pemenangan dapil VII | : Misbahusudur |
|  |  |
| **Sekertaris** | : Khorul Huda,S.Ag |
| Wakil Sekertaris Bid. Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi | : Syaifuddin, S.Pd.I |
| Wakil Sekertaris Bid. Agama dan Dakwah Pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh wakaf | : Muslicin Ustman |
| Wakil Sekertaris Bid. Hubungan Kerjasama Antar Lembaga | : Siti Aisyah, S.Pd.I |
| Wakil Sekertaris Bid. Advokasi Hukum Dan Ham | : HJ. Khoiroh, SH |
| Wakil Sekertaris Bid. Teknologi, Informasi Media dan Komunikasi | : M. Kurdi, S.H.I |
| Wakil Sekertaris lingkungan Hidup dan Penangulanggan Bencana Alam | : Hj. Sriwahyni, S.Pd |
| Wakil Sekertaris Bid. Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak | : Sofiyah, S.Fd |
| Wakil Sekertaris Bid. Ekonomi, Penembangan Koperasi dan Kewirausahaan | : Anisatul Ummah |
| Wakil Sekertaris Bid. Pendidikan, seni budaya Dan Pariwisata | : H. Zubaidi |
| Wakil Sekertaris Bid. Pemudan dan Olahraga | : Tuti’il Qomariyah |
| Wakil Sekertaris Bid. Pemenangan dapil I | : Nur Hidayah |
| Wakil Sekertaris Bid. Pemenangan dapil II | : Yunus |
| Wakil Sekertaris Bid. Pemenangan dapil III | : Hj. Nuriyah |
| Wakil Sekertaris Bid. Pemenangan dapil IV | : M. Munir, S.Ag |
| Wakil Sekertaris Bid. Pemenangan dapil V | : Syaiful Ulum, SE |
| Wakil Sekertaris Bid. Pemenangan dapil VI | : Izzatun Nisa, S.Pd.I |
| Wakil Sekertaris Bid. Pemenangan dapil VII | : Drs.Abdul Basid |
|  |  |
| **Bendahara** | : H. M. Abdullah |
| Wakil Bendahara | : Hj. Lilik Hidayati |
| Wakil Bendahara | : Roziqus Zahir |

1. Surabaya.tribunnews.com-Perempuan Gresik Kritik Dominasi Pria Dari Pemerintah Pusat Sampai RT,Senin 30 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-1)
2. Rosidawati, Imas. *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kesiapan Partai Politik dan Perempuan Indonesia di Area Politik*. 2004 [↑](#footnote-ref-2)
3. Surabaya.tribunnews.com-Perempuan Gresik Kritik Dominasi Pria Dari Pemerintah Pusat Sampai RT,Senin 30 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-3)
4. Praktis.[http://www. Uninus.ac. Id.](http://www.uninus.ac.id/) (2 Sept. 2014). [↑](#footnote-ref-4)
5. Suciptaningsih, O. A. 2010. „Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Kendal‟. *Jurnal Komunitas.* Vol. 2 No. 2. Hal. 66-68 [↑](#footnote-ref-5)
6. Wahid, U. (2013). „Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012‟. *Malaysian Journal of Communication. Vol. 29 issue 1*, hal [↑](#footnote-ref-6)
7. Astuti, T. M. P. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press. [↑](#footnote-ref-7)
8. Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. [↑](#footnote-ref-8)
9. Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya [↑](#footnote-ref-9)
10. Sugiono, *Metode Penelitian Kauntitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2010), 218-219. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : ROSDA, 2000), Hal 126 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid. hal 186. [↑](#footnote-ref-12)
13. Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : ROSDA, 2000). Hal 240. [↑](#footnote-ref-13)
14. Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasinya.* (Malang: Yayasan Asah-Asih-Asuh, 1990), 77 [↑](#footnote-ref-14)
15. Miles. Matthew B dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif.* (Jakarta: UI Press, 1992), 15-21. [↑](#footnote-ref-15)
16. Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2000), 178 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid, [↑](#footnote-ref-17)
18. Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Nusantara; Memahami Sosiologi Integralistik* (Jakarta:Kencana, 2013), 270. [↑](#footnote-ref-18)
19. Fakih, Mansour. 2005. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 8 [↑](#footnote-ref-19)
20. Dede Wiliam de Vries dan Nurul Sutarti, “Adil Gender, Mengungkap Realitas Perempuan Jambi”, *Journal Center for International Forestry Research*, No.29b (Januari, 2009), 3. [↑](#footnote-ref-20)
21. Fakih, Mansour. 2005. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 8 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 2001), 271. [↑](#footnote-ref-22)
23. Nurul Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja; Antara Domestik dan Publik”, *Jurnal Muwazah,* Vol.7 No. 2 (Desember 2015), 108-109 [↑](#footnote-ref-23)
24. Umi Sumbulah. dkk., Spektrum Gender; Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi (Malang: UIN Malang Press, 2008), 14. [↑](#footnote-ref-24)
25. Fakih, Mansour. 2005. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 15 [↑](#footnote-ref-25)
26. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000), 8. [↑](#footnote-ref-26)
27. Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, 88. [↑](#footnote-ref-27)
28. Rosidawati, Imas. 2004. *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kesiapan Partai Politik dan Perempuan Indonesia di Area Politik* [↑](#footnote-ref-28)
29. Astuti, T. M. P. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press. [↑](#footnote-ref-29)
30. Praktis.[http://www. Uninus.ac. Id.](http://www.uninus.ac.id/) (2 Sept. 2014). [↑](#footnote-ref-30)
31. Id.m.Wikipedia.org/wiki/Sunan Gresik. 12 Juli 2019 [↑](#footnote-ref-31)
32. Gresikkab.go.id/Profil/Sejarah. 13 Juli 2019 [↑](#footnote-ref-32)
33. Kecamatan Gresik Dalam Angka, 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. [↑](#footnote-ref-33)
34. Kecamatan Gresik Dalam Angka, 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. [↑](#footnote-ref-34)
35. Kecamatan Gresik Dalam Angka, 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibid [↑](#footnote-ref-36)
37. Kecamatan Gresik Dalam Angka, 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ibid [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibid [↑](#footnote-ref-39)
40. Kecamatan Gresik Dalam Angka, 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. [↑](#footnote-ref-40)
41. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitumgan Perolehan Suara. KPU [↑](#footnote-ref-41)
42. KPU Gresik [↑](#footnote-ref-42)
43. Kpud-gresikkab.go.id [↑](#footnote-ref-43)
44. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitumgan Perolehan Suara. KPU 2019 [↑](#footnote-ref-44)